Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

Yang Terhempas, Yang Bertahan

Bagaimana membayangkan roda kehidupan masyarakat Indonesia berjalan? Jika petani tak punya tanah, angkatan kerja menganggur, dan nelayan tak bisa lagi mencari ikan.

Meski masih dihadang setumpuk persoalan, MEA tetap jalan terus. Belum tuntas pula masalah-masalah *land grabbing* di tingkat akar rumput, krisis ekonomi berkepanjangan, industri modal dan asuransi yang lesu, hingga kurs nilai rupiah atas dolar yang menukik tajam. Namun Indonesia, lagi-lagi tetap bersikukuh memberlakukan MEA pada penghujung tahun ini. Dalih yang selalu didengung-dengungkan sama, yakni untuk mengangkat Indonesia dari krisis. Lepas dari apakah keikutsertaan dalam MEA itu akan mengebiri hak masyarakat atau tidak, itu soal nanti. Setidaknya keresahan itulah yang selalu dirasakan Anwar Sastro Maruf, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI).

Bukan tanpa alasan mengapa pegiat isu-isu buruh tersebut merasa demikian. Ia mengaku pernah mengalami sendiri betapa hak-haknya sebagai buruh pernah dirampas oleh korporasi. “Jauh sebelum MEA riuh dibicarakan, pada 1995 saya merasakan betul betapa kuatnya represi pabrik atas saya dan teman-teman buruh lain. Hal itu tampak dari besaran upah yang tak setimpal dengan jam kerja yang kami berikan, PHK sepihak, hingga pelarangan berserikat,” ungkapnya. Kekecewaannya terhadap mekanisme kerja korporasi inilah yang membuatnya giat menggulirkan wacana untuk “memerdekakan” buruh lewat berbagai jalur, baik secara diplomatik maupun turun langsung ke jalan menyuarakan aspirasinya.

Perjuangan tersebut menemukan momentum manakala MEA akan segera direalisasikan. Bersama-sama dengan serikat buruh, petani, nelayan, pekerja LSM, dan akademisi se-Asia Tenggara, ia merapatkan barisan. Tujuannya satu, yakni ingin merebut kembali kedaulatan dan hak asasi manusia (HAM) yang acap kali dilanggar.

Apalagi menurut hemat Sastro, MEA jelas melahirkan pelanggaran HAM yang luar biasa hingga ke tatanan masyarakat terkecil. Potensi pelanggaran, terutama hak ekosob muncul lantaran minimnya persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia. “Pemerintah kita tidak menyiapkan rakyatnya untuk menghadapi MEA, yang dilayani hanyalah kepentingan pemodal,” tegasnya.

Dalam konteks Indonesia saat ini, MEA digadang-gadang pemerintah menjadi salah satu kanal penyelamat, atas kondisi ekonomi kita yang tengah mengalami kelesuhan. “Krisis sekarang ini adalah krisis akumulasi modal sehingga uang tidak beredar. Akhirnya butuh cara-cara lewat berhutang, negara berhutang, rakyat pun berhutang. Tidak heran jika Jokowi selalu bicara tentang ekspansi dan pembangunan infrastruktur melalui MEA dan perpanjangannya: MP3EI (sekarang RPJMN. *Red*). Pembangunan infrastruktur itu meliputi pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara internasional, industri tambang,

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

perkebunan, pertanian dan perikanan, serta energi dan kelistrikan. Itu semua ditempuh supaya uang bisa masuk," ungkapnya.

Senada dengan Sastro, Rizky Mardhatillah, peneliti Asean Centre Studies UGM mengungkapkan, MEA memerlukan peran negara dalam mendistribusikan ekonomi di kawasan. "Persoalannya, Indonesia dan beberapa negara lainnya terlalu berambisi untuk mengesahkan perdagangan bebas, tanpa memperhatikan eksesnya. Selain itu, negara juga terlibat dalam proses akumulasi kapital dengan menggunakan kekuatan koersifnya untuk mendisiplinkan kelompok sosial yang resisten," ungkapnya. Rizky mencontohkan beberapa proyek pembangunan yang memang didesain untuk menopang keberlangsungan MEA. "Di Thailand, pemerintah setempat membangun megaproyek bendungan Mekong, Rembang di Indonesia, atau bisnis minyak di Myanmar," jelasnya.

Kecenderungan Indonesia untuk terus membangun dan menafikan aspek sosio humanis itu, berangkat dari pendekatan ketahanan ekonomi yang memang diterapkan Indonesia sejak krisis 1998. Pendekatan ketahanan ekonomi adalah model yang bertumpu pada kuantitas stok dan harga. "Asumsinya teori *supply and demand*. Kalau terjadi kelangkaan pangan misalnya, maka yang dilakukan adalah meningkatkan stok dan memainkan harga. *Nah*, yang punya kuasa untuk memainkan harga dan stok, *ya,* korporasi besar, agroindustri contohnya. Kalau tidak berhasil, jalan hutang pun dimanfaatkan," jelas Edy Burmansyah, pegiat ARC saat dijumpai beberapa waktu lalu.

Tergilas di negeri sendiri

Tahap selanjutnya adalah, rakyat akan cenderung berhadapan dengan penggusuran/ *land grabbing* seperti yang terjadi di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur baru-baru ini; liberalisasi ketenagakerjaan dengan membuka kans seluas-luasnya kepada ekspatriat agar bisa bekerja di dalam negeri; represi dan kriminalisasi petani seperti yang ditemui di Kulon Progo dan Urut Sewu; dan lain sebagainya.

MEA, lanjut Edy, juga menimbulkan persoalan karena neoliberalisasi mendorong investasi dalam skala besar masuk ke Indonesia. Investasi ini membutuhkan lahan, sehingga alih fungsi lahan produktif menjadi sangat tinggi. "Contoh yang paling dekat dengan kita misalnya di Karawang. Di sana lahan beralih fungsi jadi pabrik, usaha jasa, dll. Petani rugi, karena mereka tidak lagi punya tanah, pun tak punya akses ke sektor industri. Walhasil mereka terdorong untuk melakukan urbanisasi. Di kota pun mereka tak mendapat tempat, hingga terpaksa bekerja di sektor informal jadi pemulung, tukang ojek, kuli bangunan. Puncak dari kondisi kerentanan sosial itu, akan memicu banyaknya aksi kriminalitas di perkotaan," tuturnya.

Kuasa atas lahan yang lebih condong dikendalikan oleh korporasi kian mulus, karena difasilitasi oleh negara. Di era Orde Baru, izin penguasaan lahan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) bagi modal asing dibatasi 75 tahun, sementara di era SBY batasan diperpanjang hingga 95 tahun. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang tertuang dalam UUPA yang membatasi izin maksimal 35 tahun saja (IGJ).

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

Masih dilansir dari laman *dotcom* IGJ, imbas dari kebijakan pemerintah yang sangat memanjakan modal asing, yakni pengalokasian 175 juta hektar lahan di darat dan di laut Indonesia untuk pertambangan mineral, batubara, perkebunan, dan eksploitasi migas. Jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan luas daratan Indonesia yang hanya 195 juta hektar. Lebih dari 75% kegiatan yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam di semua sektor tersebut dikuasai oleh modal asing. "Bahkan tidak jarang izin yang diberikan pemerintah pusat berbenturan dengan izin yang dikeluarkan pemerintah daerah," ungkap Sri Palupi, peneliti Ecosoc Rights Institute.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, hegemoni lahan yang berada di tangan korporasi akan melahirkan model industri baru yang sama berbeda dengan sebelumnya. Di sektor pertanian misalnya, perampasan atas lahan petani oleh agribisnis akan mendorong tumbuhnya perkebunan-perkebunan, sampai tercapainya *food estate*. "Melalui agribisnis, pertanian diproduksi secara industri, dalam jumlah sebanyak-sebanyaknya dengan ukuran seragam dan bersifat monokultur," jelas Ahmad Yakub, pegiat Serikat Petani Indoesia (*www.indoprogress.com*).

Yakub menambahkan, agribisnis juga memunculkan pasar bebas, di mana hambatan transaksi sama sekali nihil. Lantaran semangat dari pasar bebas adalah pengerukan keuntungan sebesar-besarnya, maka aktivitas bertani tereduksir menjadi produksi komoditas saja, alih-alih menyambung siklus kehidupan secara mandiri. Peran petani pun di sini juga dirancang sedemikian rupa untuk menjadi sekadar buruh murah.

Rizky Mardhatillah menuturkan, dalam konteks ini—luas lahan yang semakin menyusut dan ancaman ekspansi modal kaum industrialis—para petani dipaksa menghadapi dua pilihan sulit: tetap bertahan dengan produktivitas hasil pertanian yang terus menurun atau menjual lahannya kepada pemilik modal. Di Indonesia, implikasinya terbagi dua: (1) petani harus rela kehilangan tanah dan menjadi 'buruh tani' –atau petani yang menggarap sawah orang lain dan konsekuensinya hidup dari upah atau (2) bekerja ke kota untuk menyambung hidup, baik menjadi kaum miskin perkotaan atau buruh pabrik.

Dalam Rancangan Inpres Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Menghadapi MEA 2015, tidak terlihat keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah hanya akan menambah akses permodalan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan standar mutu produksi pangan. Namun, persoalan klasik yang dihadapi petani tidak masuk dalam strategi yang disiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing petani. Petani dan nelayan tetap diletakan di posisi terbawah dalam rantai produksi pangan. Tidak ada nilai tawar yang tinggi terhadap hasil produksi petani. Hal ini karena korporasi dalam praktek agribisnis telah mengambil kontrol atas segi hulu-hilir dalam sektor pangan, seperti penentuan harga produksi, suplai, komodifikasi pangan, distribusi, hingga pengetahuan. Pada akhirnya gagasan kedaulatan petani pun berakhir utopis (IGJ).

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

Hal yang jauh lebih mengkhawatirkan muncul ketika negara menggandeng militer untuk mengamankan laju korporasi di bidang pertanian ini. “Hal itu sudah terlihat di Urut Sewu, di mana aparat dengan beringas memukuli petani yang tak bersenjata hingga mereka menderita luka-luka,” jelas Edy lagi. Lurah setempat yang ikut menghalau pendirian pabrik semen, dihantam keningnya oleh aparat hingga berdarah. Ibu yang tengah hamil empat bulan, anak-anak yang ikut dalam kerumunan massa, hingga lelaki tua, semua tak luput dari serangan aparat militer yang konon mendapat titah langsung dari negara.

Baru-baru ini, menurut Sastro, bahkan beredar kabar, ada draf Perpres yang memuat ketentuan tentang fungsi tambahan aparat militer tidak hanya di sektor pertahanan tapi juga pengamanan. “Macam dwi fungsi ABRI begitu. Beberapa MoU itu bahkan sudah berjalan.

IMPARSIAL mencatat, ada kurang lebih 31 MoU TNI. Dengan dalih melakukan operasi militer selain perang (OMSP), TNI kini mulai masuk dan terlibat dalam ranah sipil dan menjalankan fungsi keamanan dengan pijakan MoU tersebut. Sayangnya, otoritas sipil baik itu pemerintah dan parlemen tidak melakukan koreksi dan evaluasi terhadap semua MoU yang ada.

Koalisi masayarakat sipil dalam rilisnya (September, 2015) menilai, pelibatan militer dalam operasi militer selain perang yang di dasarkan pada MoU TNI bertentangan dengan UU TNI no 34/2004. Secara tegas Pasal 7 ayat 3 UU TNI menyebutkan, pelaksanaan tugas operasi militer selain perang harus di dasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara dan bukan melalui MoU. Keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama dewan perwakilan rakyat (DPR) yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dengan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI). Dengan demikian, beberapa MoU yang sudah dibuat jelas-jelas bertentangan dengan UU TNI no 34/2004 (Rilis Koalisi Masyarakat Sipil, 2015).

Dengan dibentuknya berbagai MoU yang berlebihan tersebut, maka menurut Sastro TNI sudah kembali masuk dalam ranah wilayah sipil dan terlibat langsung dalam menjaga keamanan dalam negeri. “Tengok saja berbagai aksi kekerasan yang melibatkan elemen TNI di dalamnya, seperti penggusuran, pengamanan stasiun, pengamanan pertambangan, pengamanan kawasan industri, dan kasus-kasus lainnya,” tegasnya lagi. Sastro menambahkan, ini jelas menjadi kemunduran demokrasi dan kemunduran bagi proses reformasi sektor keamanan yang mensyaratkan bahwa fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara sebagaimana di tegaskan UU TNI.

Senada dengan petani, buruh juga menghadapi keadaan yang sulit. Musuh yang mereka hadapi masih sama: korporasi, tapi kondisi buruh di Indonesia lebih parah karena daya saing mereka yang jauh lebih minim. Data Badan Pusat Stastitik per Februari 2015,

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

jumlah pengangguran meningkat sebanyak 210 ribu orang dibandingkan Agustus 2014, dan meningkat sebanyak 300 ribu dibandingkan Februari 2014. Jumlah pengangguran seharusnya menjadi indikator sehat-tidaknya kinerja ekonomi suatu negara. Kelesuan ekonomi nasional pada kuartal I 2015, berimbas kepada bertambahnya jumlah pengangguran. Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar. Hal ini diperkuat oleh menurunnya Nilai Tukar Petani pada empat bulan terakhir (IGJ).

Kepala Kerjasama Antarlembaga dan Hubungan Internasional IGJ Priska Sabrina Luvita, sebagaimana dilansir dari laman resmi IGJ menjelaskan, pada Februari 2015 terdapat 10,04 juta orang (8,31 %) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan yang juga mengalami kenaikan. Serapan tenaga kerja pada kuartal I 2015 kerja-kerja tanpa kepastian yang tetap dan kerja informal yang mendominasi 57,94% dari Angkatan Kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu menciptakan kepastian kerja bagi rakyatnya. Pun, tingkat pengangguran berpendidikan yang meningkat 1,84 juta orang untuk lulusan SMK, 1,62 juta orang untuk lulusan Diploma I/II/III, dan 1,03 juta orang lulusan Universitas juga mengkhawatirkan bagi serapan tenaga berpendidikan di Indonesia dalam menyambut pengembangan Sumber Daya Manusia dalam isu bonus demografi dan arus tenaga kerja asing di MEA.

Angka pengangguran yang relatif tinggi, kian diperparah dengan keleluasaan pekerja ekspatriat dalam mengisi pasar di Indonesia. Untuk tahun ini saja Kementerian Tenaga Kerja mencatat, sebanyak 70.000 ekspatriat sudah memasuki pasar tenaga kerja di Indonesia. Mereka datang dengan kualitas yang dalam beberapa aspek jauh lebih baik dibanding yang kita punya.

Masalah lain yang membuat potensi pelanggaran HAM kian menjadi-jadi dalam MEA adalah, korupnya birokrasi. Contohnya, hak untuk ganti rugi proyek waduk Jatigede hanya diberikan per kepala keluarga sebanyak 29 juta rupiah saja (Lihat Buletin ASASI Edisi Maret-April 2015). “Angka itu jelas tak setimpal dengan besarnya kerugian baik moril dan materil yang warga alami, seperti kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, serta ruang sosial dan budaya,” kata Sastro.

Di sisi lain, proletarisasi rakyat di pedesaan dalam merespon kejadian senada akan menguat. “Jarang ada orang yang menghubungkan proyek MEA dengan berbagai penggusuran, pembangunan jalan tol, dan pengalihfungsian lahan pertanian warga. Ketika kita memahami itu, ya semuanya akan terkait. Bahwa kita sedang disiapkan menjadi ceruk pasar yang besar,” imbuhnya.